

Daftar Pustaka

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT INDEKS.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangn Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta : Deepublish
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.

Jurnal :

- Ajie, M. D. (1996). *Pengertian Sistem Informasi Manajemen*.
- Alfiah, S. (2016). *E-budgeting (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). " *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Atmaja, D. A. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Ayu, L., Sitti, N. N., & Jaka, D. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi Pada Lima Desa Di Kecamatan*

Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). In Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis.

Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 0164.

Dewanti, E. D. W. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).

Erdiansyah, D. R. (2017). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem *E-budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.

Handayani, R. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta) (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Hendri, S., Ardania, N. P. C. A., Rakhmawati, I., & Atikah, S. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah.

Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Universitas PGRI Yogyakarta.

Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).

Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep *E-government*: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 174-201.

Jati, R. K. (2017). Analisis Kriteria Pengembangan Penganggaran Elektronik Menggunakan Software Quality Function Deployment (SQFD) dari Sudut Pandang Pengguna. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 15(1), 1-12.

- Jaya, A. (2017). Efektivitas Anggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Polsri*, 1(1).
- Mayowan, Y. (2017). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). *Profit (Jurnal Administrasi Bisnis)*, 10(1), 14-23.
- Mustapa, Z. (2011). Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance: Peluang Atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik?. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 2(2), 179-196.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179-191.
- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep Dan Kondisi *E-government* Di Indonesia. *Jupiter*, 1(1).
- Sosiawan, E. A. (2015, June). Evaluasi Implementasi *E-government* Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. In *Seminar Nasional Informatika (Semnasif)* (Vol. 1, No. 5).
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2).
- Susanto, A., & Wicaksono, W. (2016). Pra-Evaluasi Penerapan Electronic Government Di Indonesia: Sebuah Analisis Kapabilitas. *Jurnal Teknik Informatika*, 9(2).
- Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Umami, R & Nurodin, I (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11).
- Widyastuti, N. M. A., Edy Sujana, S. E., ADIPUTRA, I. M. P., & Si, M. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1).

Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Melalui Penerapan *E-budgeting* (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.

Perundang-undangan :

Keputusan Lurah Desa Tamantirto No 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Tamantirto No 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tamantirto.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Website/ link :

Data korupsi dana desa oleh ICW, diakses dari <http://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada 29 September 2017

Blue Print e-government oleh Depkominfo, diakses dari http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file=digital/125450=%5B_Konten_%5Dkonten%20C8661.pdf pada 15 Oktober 2017